

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL
EKONOMI WILAYAH DI DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR
KABUPATEN KARIMUN**

Ermawati¹, Adji Suradji Muhammad², Nazaki³
wwermawati@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja
Ali Haji

Abstract

Village development us an integral part of national development, thus village development has an important and inseparable role and contributes to regional and national development. The underdevelopment of rural areas is still a major unresolved problem. Rural areas in the interior are very much different in terms of development. Development is a process of change for the better thought planned efforts. Development is a process of change that covers the entire social system, such as politics, economy, infrastructure, defense, education and technology, institutions and culture. Limited infrastructure has been a dolng-standing problem faced by rural areas, especially in rural development. To deal with infrastructure should be addressed on the basis off need and effectiveness. Infrastructure development is one of the important and vital aspects to accelerate the national development process. infrastructure also plays an important role as one of the driving wheels of economic growth. This study aims to determine the implementation of regional socio-economic infrastructure development programs. The method used in this study is a qualitative descriptive method with 10 (ten) informants and using data collection techniques and tools in the form of observation, interview and documentation. In this study, it can be seen that road construction in the regional socio-economic infrastructure development programs has developed a lot.

Keywords : Program Implementation, Regional Socio-Ekonomik Infrastructure Development

I. Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dengan demikian pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dan bagian yang tidak terpisahkan serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terkait dengan begitu banyaknya program dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah untuk pembangunan desa. Pembangunan di negara yang sedang berkembang mengandung dua dimensi, yaitu tujuan dan proses. Tujuan pembangunan sudah pasti kondisi kehidupan yang lebih baik sebagaimana na yang di inginkan oleh masyarakat. Sedangkan proses untuk mencapai tujuan itu dinyatakan dalam berbagai strategi pembangunan. Terbelakangnya daerah perdesaan masih merupakan masalah besar yang belum teratasi. Daerah perdesaan di pedalaman sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.

Permasalahan infrastruktur yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi sehingga diperlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan infrastruktur di perdesaan. Kurang lancarnya aksesibilitas ke pusat perkotaan, fasilitas umum dan pusat kegiatan masyarakat merupakan masalah utama bagi sebagian masyarakat di perdesaan. Transportasi yang baik ke daerah perdesaan akan memudahkan bagi mereka yang tinggal di desa dan bekerja di kota untuk pulang balik kerja, tanpa harus berpindah ke kota. Dengan dibanggunya sarana transportasi (dalam hal ini infrastruktur desa), kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas.

Keterbatasan infrastruktur sudah menjadi masalah lama yang dihadapi oleh perdesaan terutama dalam pembangunan perdesaan. Untuk menangani masalah infrastruktur sebaiknya ditangani berdasarkan kebutuhan dan ketepatangunaan. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital, untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan salah satu Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah adalah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat di perdesaan, berdaya dan mampu mengelola sumber daya lokal yang ada guna meningkatkan ekonomi rumah tangganya. Selain itu pula Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah mempunyai tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, serta penguatan institusi lokal di tingkat desa. (Suhono, 2016) . Kecamatan atau desa yang berhak mendapat program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah harus memiliki beberapa kriteria, yakni kecamatan atau desa yang berpotensi berbasis agropolitan, peningkatan sektor ekonomi masyarakat dan rencana tata ruang yang searah dengan pemerintah kabupaten atau kota.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 176/KTSP/M/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Kabupaten Karimun yang mendapat bantuan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah adalah 3 Kecamatan dan dibagi menjadi 6 Desa.

Kabupaten Karimun mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah sebesar Rp 1.8 miliar untuk tiga kecamatan. Yaitu kecamatan Durai di desa Tanjung Kilang dan desa Telaga Tujuh, kecamatan Kunder di desa Sungai Sebesi dan desa Sungai Ungar, serta kecamatan Kunder Barat untuk desa Sawang Laut dan desa Kunder. Masing-masing kecamatan untuk penggunaan alokasi Pengembangan Infrastruktur

Sosial Ekonomi Wilayah mendapatkan dana sebanyak Rp600 juta yang akan membangun infrastruktur di dua desa, dimana Rp590 juta dipergunakan untuk infrastruktur dan Rp10 juta untuk operasional.

Infrastruktur di Kabupaten Karimun tepatnya di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur sangat penting dibangun disebabkan kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari kebutuhan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur adalah fasilitas fisik beserta layanannya yang diadakan untuk bekerjanya sistem sosial ekonomi agar menjadi lebih berfungsi bagi usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai masalah.

Penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintahan terutama pada aspek infrastruktur sosial yang mencakup hidup masyarakat yaitu pengadaan penerangan jalan berupa aliran listrik yang sangat memprihatinkan serta akses transportasi jalan yang kurang layak untuk ditempuh karena kondisi jalan yang sulit dilalui dan beberapa jalan antara desa ke desa yang lain apabila jika hujan turun akses jalan sulit ditempuh akibat belum adanya pengaspalan untuk sebagian jalan di desa Sungai Sebesi. Dengan segala kekurangan melalui daerah yang tertinggal dan perekonomian yang kurang membuat masyarakat membutuhkan sebagian infrastruktur yang memadai. Kenyataannya infrastruktur inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun, dengan adanya program bantuan tersebut dapat memudahkan masyarakat demi kelangsungan hidup dan perkembangannya. Karena adanya fasilitas tersebut masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih layak lagi.

II. Metode Penelitian

Dilihat dari jenis data pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2015:4). Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, dan lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendalami peristiwa khusus pada kondisi objek yang alamiah dan menghasilkan data deskriptif secara tertulis atau lisan, dimana dalam pengumpulan data secara fundamental sangat bergantung pada proses pengamatan peneliti itu sendiri.

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi bagaimana Implementasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur.

III. Hasil dan Pembahasan

No	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Pengaruh Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Terhadap Pengembangan Wilayah di Kecamatan Naman Teran	Pada penelitian ini menyatakan bahwa pengembangan masyarakat melalui pengelolaan potensi masyarakat belumlah cukup, untuk melengkapinya, aspek-aspek startegis kemasyarakatan yang harus diperhatikan adalah aspek kepemimpinan,	Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.

	Kabupaten Karo.(Ginting & Afifuddin, 2012)	pengorganisasian dan kontribusi. Di dalam aspek kepemimpinan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, kerjasama, peran serta, komitmen dan kebijakan sangat berpengaruh dalam mengakselerasi proses kemajuan. Sementara itu, dalam aspek organisasi, struktur organisasi, anggota tim. Peran tugas dan tanggung jawab berfungsi memastikan bergerak tidaknya suatu proses yang tengah diupayakan. Sesungguhnya masyarakat lebih mengetahui situasi geografis dan kapasitas mereka sendiri, maka melalui pendekatan Program PISEW yang bersifat stimulan, masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dan belajar untuk mengidentifikasi serta mengupayakan solusi atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi yang terkait dengan upaya pembangunan aspek sosial, ekonomi dan lingkungannya, termasuk penyertaan peran perempuan dalam setiap inisiatif pembangunan. Teori yang digunakan menggunakan Teori Survey (Arikunto, 2006)	
2.	Implementasi Kebijakan Program Infarstruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kabupaten Karo.(Mustopa, Zaenal. 2020)	Pada penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Kabupaten Subang tersebut masih belum optimal hal ini terlihat dari beberapa indikator. 1) kurang dilakukan sosialisasi oleh Satuan Kerja Kabupaten; 2) Keterbatasan kemampuan sumber daya; 3) Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan dikarenakan informasi ke masyarakat belum secara utuh tersampaikan dengan baik terkait program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah. Teori yang digunakan menggunakan teori Implementasi kebijakan model Edward III.	Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.
3.	Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW).(Fitriani, Aida. 2014)	Pada penelitian menyatakan bahwa pembangunan, pemanfaatan dan pengembangan prasarana yang di bangun oleh kegiatan PNPM-PISEW di Kecamatan Sintang Tahun 2014 secara keseluruhan dapat berfungsi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Khususnya untuk jalan tanah dapat berfungsi memperlancar lalu lintas darat masyarakat. Jembatan dan air bersih dapat dimanfaatkan dengan baik juga walaupun ada beberapa sumur bor yang kurang volume airnya pada saat	Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.

		musim kemarau yang lebih dari satu minggu. Diharapkan dengan adanya kegiatan PNPM-PISEW dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mengelola pembangunan, menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat kemampuan aparat dalam memfasilitasi masyarakat dan mengelola pembangunan, menyediakan tempat dibangunnya baik itu prasarana perdesaaan, kesehatan dan ekonomi produktif khusus dalam bidang pertanian.	
4.	Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.(Erwan, 2016)	Pada penelitian menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program PNPM-PISEW di Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) masih lemahnya sinergisitas yang menghambat program dari kegiatan PNPM-PISEW dan rendahnya kemampuan masyarakat dalam sasaran pemberdayaan. Menggunakan teori Evaluasi model Dunn.	Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.
5.	Kajian Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Untuk Jalan Lingkungan di Kabupaten Lombok Timur.(Nyoman Ni Kencanawati, 2020)	Pada penelitian menyatakan bahwa program strategi yang bisa diterapkan untuk menunjang keberhasilan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di jalan lingkungan di Kabupaten Lombok Timur: 1) Meningkatkan fasilitas infrastruktur jalan lingkungan yang belum tersentuh untuk menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat serta pertumbuhan berbagai industri di sekitar wilayah tersebut. 2) Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat pentingnya program jalan lingkungan untuk mengurangi angka kecelakaan. 3) Meningkatkan partisipasi bersama masyarakat dalam penyerapan aspirasi untuk peningkatan kualitas perencanaan program. Menggunakan analisis SWOT.	Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian yang penulis lakukan yaitu lebih memfokuskan bagaimana Implementasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun dilihat dari tahap 2 (dua) : indikator 1 (satu) isi kebijakan dan indikator 2 (dua) lingkungan implementasi, yang masing-masing mempunyai poin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dari pembangunan jalan pada program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan jalan yang dibangun telah memberikan dampak positif untuk sisi sosial maupun ekonomi. Pembangunan jalan yang dibangun juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerataan pembangunan di Desa Sungai Sebesi. Jumlah informan sebanyak 2 orang dari pihak pelaksana program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah dan 3 orang dari pekerja program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah dan 5 orang dari masyarakat. Jumlah informan dalam penelitian ini sudah cukup mewakili dengan

mewawancarai orang-orang yang dianggap mengetahui informasi dan data yang dibutuhkan peneliti. Penelitian ini menggunakan variabel yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle yang disebut dengan *Iplementation as A Political and Administrative Process*.

1. Isi kebijakan (*Content of Policy*),

Ada 6 Indikator dalam dimensi ini, yakni :

a. Kepentingan Yang Mempengaruhi

Kepentingan yang mempengaruhi menurut (Grindle, 1980:186) menyatakan bahwa berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap impleentasinya.

Kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasi program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun yang dilaksanakan oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Kecamatan Kundur.

Dapat peneliti simpulkan dari wawancara diatas bahwa mengenai kepentingan yang mempengaruhi dalam program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah melalui pembangunan jalan yang dibuat ini hanya untuk masyarakat semata dan untuk kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga daerahnya terbangun dan masyarakat mudah untuk melakukan aktivitas perjalanan.

b. Jenis Manfaat Yang Diperoleh

Pada poin *Content of Policy* isi kebijakan menurut Merille S. Grindle berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kepada banyak pelaku lebih mudah di implementasikan dibanding dengan kebijakan yang kurang bermanfaat.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah sebagai yang memberikan program tersebut harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah ke arah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya adalah suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah pusat untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta bermanfaat.

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah adalah salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat di perdesaan berdaya dan mampu mengelola sumberdaya lokal yang ada, guna meningkatkan ekonomi rumah tangganya. Tujuannya adalah meningkatkan pengembangan sosial ekonomi wilayah berbasis pada potensi sumberdaya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa informan diatas untuk jenis manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan pembangunan fisik pada program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah adalah manfaat yang diperoleh adalah untuk perekonomian masyarakat semakin meningkat dan juga masyarakat mendapat kemudahan dalam bertransportasi kemanapun.

Selain dampak positif dengan adanya pelaksanaan pembangunan jalan untuk masyarakat di desa Sungai Sebesi juga berpeluang melahirkan dampak negatif berupa terjadinya konflik sosial. Hal ini disebabkan kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

pada umumnya terjadinya konflik dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah juga berpotensi melahirkan kecemburuan antara satu wilayah/desa yang mendapat program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah dengan desa lainnya yang tidak dilaksanakan program tersebut. Gambaran tersebut diatas tentu saja bukan untuk dikeluhkan dan menjadi apatis, tetapi justru harus menjadi peringatan kepada kita semua pengelola pembangunan termasuk BKAD dan pemerintah kecamatan untuk mempercepat target penurunan angka kemiskinan di daerah.

c. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Menurut Merilee S. Grindle, indikator derajat perubahan yang diinginkan menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Sebuah kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara berkelanjutan. Suatu implementasi yang baik akan memberikan *output* yang baik untuk jangka waktu yang singkat maupun yang panjang secara terus menerus serta teratur.

Pembangunan jalan pada Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah menginginkan perubahan yaitu infrastruktur fisik pada pembangunan jalan guna meningkatkan kesejahteraan dikalangan masyarakat khususnya masyarakat Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kunder.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa informan diatas untuk derajat perubahan yang diinginkan untuk program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah pada pembangunan jalan di Desa Sungai Sebesi ini memudahkan perekonomian bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya pembangunan jalan dapat memberikan kenyamanan bagi pengendara melewati jalan tersebut. Dapat disimpulkan disini juga dengan adanya pembangunan jalan memberikan kesadaran bagi setiap individu untuk menjaga infrastruktur jalan tersebut.

Dalam pelestarian dan kesinambungan prasarana dan sarana yang telah dibangun, diperlukan adanya pemanfaatan dan keberlanjutan atau sering disebut sebagai pemanfaatan dan pemeliharaan secara optimal oleh masyarakat pengguna prasarana dengan pendampingan/pembinaan dari BKAD. Karena itulah dengan adanya pemanfaatan dan pemeliharaan konstruksi yang telah dibangun benar-benar berfungsi dalam melakukan pengoperasian dan pemeliharaannya, diharapkan dapat mengembangkan infrastruktur tersebut. Hal ini penting agar dapat tercapainya tujuan berikut ini, yaitu : jaminan berfungsinya prasarana dan sarana yang telah dibangun secara berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas hidup dan tingkat perekonomian masyarakat, meningkatnya fungsi kelembagaan masyarakat di desa dan kecamatan dalam pengelolaan hasil kegiatan, tumbuhnya rasa memiliki terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

BKAD perlu mengadakan campur tangan terhadap masyarakat sehingga masyarakat di perdesaan akan menjadi masyarakat yang berdaya dalam mengelola sumber daya di daerahnya. Pemanfaatan dan pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar prasarana dan sarana tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan diman letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para *Stakeholders* dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan satu peogram harus

sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama.

Letak pengambilan keputusan pada pembangunan jalan pada Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah dapat menentukan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ketika keputusan yang ditetapkan berjalan dengan baik maka tujuan dari kebijakan dapat tercapai dengan baik pula. Adapun letak pengambilan keputusan dalam kebijakan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Desa Sungai Sebesi.

Pada letak pengambilan keputusan untuk program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah bahwa keputusan yang diberikan sudah tepat untuk desa yang terdani untuk pelaksanaan program ini. Apabila ada keputusan yang tidak tepat tim pelaksana lapangan dan masyarakat akan mendiskusikan kembali terkait keputusan yang tidak sesuai.

Peranserta masyarakat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan masyarakat, yakni proses komunikasi dua arah secara terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan. Tujuan dasar dari peranserta masyarakat adalah menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

e. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu kebijakan.

Dalam hasil pelaksanaan program dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan program pembangunan jalan ini masyarakat sangat antusias dan sangat berterimakasih dengan adanya program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah. Sudah mampu memberikan warga masyarakat kemudahan dalam infrastruktur fisik pada pembangunan jalan ini dan juga dengan adanya pembangunan jalan ini dapat mensejahterahkan masyarakat sekitar.

f. Sumber-sumber Daya yang Dilibatkan

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan yang memiliki dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

Salah satu kunci keberhasilannya adalah pelibatan masyarakat sejak perencanaan hingga pelaksanaan sebuah kegiatan dan semangat yang harus ditanamkan pada jiwa masyarakat adalah semangat kepentingan diri mereka sendiri, kelompok dan lingkungan mereka. Hal ini akan melahirkan rasa kepemilikan atas inisiatif, upaya dan kegiatan yang mereka laksanakan dimana kondisi tersebut akan berfungsi sebagai pilar yang mengukuhkan kebersamaan mereka untuk maju dan membangun bersama.

2. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

Ada 3 Indikator Dari Dimensi Ini :

a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Menurut Merille S. Grindle kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat menjelaskan dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dalam indikator kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat ialah peneliti mengatakan sosialisasi yang dilakukan untuk pelaksanaan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah belum optimal maka perlunya seluruh tim pelaksana dan masyarakat melakukan upaya percepatan kegiatan di setiap tingkatan dengan meningkatkan intensitas pertemuan rutin.

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini akan dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dalam implementasi kebijaksanaan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya akan terlepas dari karakteristik atau peran dari pelaksana kebijakan itu sendiri.

Karakteristik lembaga dan penguasa yang baik untuk pelaksanaan pembangunan jalan pada program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah tidak hanya sekedar tim pelaksana dari kabupaten maupun di kecamatan saja, tetapi juga masyarakat jalan Parit Tegak, untuk tim pelaksana terkait program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah sebagai lembaga penguasa setempat harusnya menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan segala keluhan terkait pembangunan jalan pada program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ini.

Hasil observasi, wawancara menunjukkan bahwa karakteristik lembaga dan penguasa telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembangunan jalan pada pelaksanaan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ini. Karakteristik dan lembaga dan penguasa di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur selalu membangun hubungan yang baik antara pekerja dan tim pelaksana, selain itu juga keterbukaan dan membangun komunikasi yang baik melalui penyediaan sarana penyampaian keluhan.

c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Menurut Merille S. Grindle menjelaskan hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan dari program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah tersebut.

Hal ini juga bagian terpenting dari proses implementasi suatu kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengimplementasian program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ini agar dapat terlaksana dengan baik, secara optimal dan mensejahterahkan masyarakat disekitar.

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dan observasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dari para pekerja dan tim pelaksana dalam menjalankan tugasnya sudah berjalan dengan sangat baik. Masing-masing memiliki komitmen yang tinggi dengan sepenuh hati dalam melaksanakan tugasnya. Untuk daya tanggap dari tim pelaksana sangat antusias sudah diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang diberikan kepada pusat melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah, dan juga masyarakat sangat-sangat bersyukur dengan adanya pembangunan jalan

dalam pelaksanaan program ini, yang sudah memberikan kemudahan masyarakat untuk beraktivitas dan perekonomian masyarakat semakin membaik.

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah adalah salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat yang bertujuan agar masyarakat di perdesaan berdaya dan mampu mengelola sumber daya lokal yang ada guna meningkatkan ekonomi rumah tangganya. Selain itu juga Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah mempunyai tujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, serta penguatan institusi lokal di tingkat desa. Kriteria lokasi pelaksanaan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah adalah memiliki potensi yang dikembangkan sebagai kawasan pusat pertumbuhan, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, merupakan kebijakan pemerintah yang dapat mempercepat pengembangan ekonomi kawasan dan menciptakan lapangan kerja.

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah bukan sekedar berbicara mengenai berapa panjang jalan yang telah dibangun, atau berapa irigasi yang telah dibangun, akan tetapi yang terpenting dan merupakan pokok permasalahan adalah bagaimana program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Impelementasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

a. Kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi

Dalam indikator kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi yaitu kepentingannya hanya untuk masyarakat Desa Sungai Sebesi tepatnya masyarakat Parit Tegak dan Parit Gantung.

b. Tipe Manfaat

Manfaat dari pembangunan jalan pada program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ini sangat dirasakan bagi masyarakat di Desa Sungai Sebesi khususnya warga masyarakat yang tinggal di jalan Parit Tegak dan Parit Gantung. Dengan adanya pembangunan jalan memberikan perubahan dan kemudahan warga masyarakat saat berkendara. Manfaat negatif dari adanya program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah untuk pelaksanaan pembangunan jalan menimbulkan rasa kecemburuan sosial terhadap desa atau kecamatan lain yang tidak mendapatkan program tersebut.

c. Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Derajat perubahan yang di inginkan diharapkan dengan adanya infrastruktur fisik pada pembangunan jalan ini masyarakat menjaga dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Sehingga dengan adanya pembangunan jalan ini perekonomian masyarakat sekitar dapat bertambah.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Tim Pelaksana Kabupaten dan kepala BKAD pada program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Sungai Sebesi pada letak pengambilan keputusan pada pembangunan jalan ini sudah melalui tahapan-tahapan dan terbilang lancar. Untuk permasalahan keputusan bisa di sosialisasikan melalui desa masing-masing dan juga kepala desa termasuk BKAD sendiri.

e. Pelaksana Program

Pada tahap pelaksana program pembangunan jalan ini masyarakat sangat antusias dan sangat berterimakasih dengan adanya pembangunan jalan program PISEW. Yang sudah

mampu memberikan warga masyarakat kemudahan dalam infrastruktur fisik pada pembangunan jalan ini dan juga dengan adanya pembangunan jalan ini dapat mensejahterahkan masyarakat sekitar.

f. Sumberdaya Yang Dilibatkan

Untuk mengenai sumberdaya manusia yang dilibatkan dalam pembangunan jalan pada Program PISEW di Desa Sungai Sebesi memang sudah mencukupi. Terlebih pada proses pembangunan jalan yang bekerja adalah masyarakat sekitar.

2. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlihat

Sosialisasi yang dilakukan untuk pelaksanaan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah belum optimal dimana masyarakat desa Sungai Sebesi khususnya masyarakat Parit Tegak dan Parit Gantung hanya sebagian saja yang mengikuti sosialisasi tidak menyeluruh, dimana program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah bertujuan agar masyarakat di perdesaan berdaya dan mampu mengelola ekonomi rumah tangganya.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Karakteristik lembaga dan penguasa telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembangunan jalan pada pelaksanaan program PISEW ini. Karakteristik dan lembaga dan penguasa di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur selalu membangun hubungan yang baik antara pekerja dan tim pelaksana, selain itu juga keterbukaan dan membangun komunikasi yang baik melalui penyediaan sarana penyampaian keluhan. Hanya saja dari para pekerja yang terjadi keluhan dengan adanya ketidakpuasan antara satu dengan yang lainnya.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Untuk tingkat kepatuhan dari sikap para petugas tim pelaksana Kabupaten dan Kecamatan yang memonitoring hasil pekerjaan di setiap desa sudah baik, tetapi mereka tidak datang sesuai jadwal yang ditentukan, mereka datang tidak bisa dipastikan, itu dikarenakan banyaknya desa yang harus di monitoring oleh mereka sementara jumlah petugas terbatas dan berbagi pekerjaan dengan pelaksanaan program lain yang sedang dilaksanakan. Karena kalau para tim pelaksana menentang program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah maka implementasi kebijakan akan menjadi sulit. Tanpa adanya dukungan maka tim pelaksana akan merasa terpaksa dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak bisa secara penuh melaksanakan kewajibannya.

V. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Erwan. (2016). *Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan*. 1–7.

Ginting, E. B., & Afifuddin, S. (2012). *Pengaruh Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Terhadap Pengembangan Wilayah Di Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo*. 174–180.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey.

Fitriani, Aida. (2014). *Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW)*. 152–161.

Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Nyoman Ni Kencanawati, Z. dan M. (2020). *Kajian Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Untuk Jalan Lingkungan di Kabupaten Lombok Timur*. 15(4), 4097–4108.

Suhono, A. (2016). *Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)*. Cipta Karya.

Mustopa, Zaenal/ (2020). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kabupaten Subang*. 7, 244–250.

Peraturan Perundang-Undangan

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 176/KTSP/M/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Kabupaten Karimun